

BAB V KESIMPULAN

Melihat fakta bahwa Indonesia pun turut mengalami dampak yang cukup besar dari perubahan iklim terhadap laut—mengingat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan dan banyak penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup dari laut—dimana dampak yang dialami Indonesia dan juga negara kepulauan lainnya tersebut cukup kompleks—tidak hanya sektor lingkungan, melainkan juga sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan—maka Indonesia menyadari perlunya suatu upaya untuk melindungi kepentingan nasional dalam penanggulangan dampak perubahan iklim terhadap laut.

Indonesia menyadari bahwa berbagai upaya bilateral yang telah dilakukan untuk menanggulangi dampak perubahan iklim terhadap laut masih belum efektif, mengingat perubahan iklim sudah menjadi isu internasional dimana semua negara menaruh perhatian besar terhadap isu ini. Oleh karena itu, Indonesia memilih melakukan upaya melalui diplomasi multilateral untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Diplomasi multilateral tersebut kemudian diimplementasikan dengan berinisiasi menyelenggarakan *World Ocean Conference (WOC) 2009* di Manado, Sulawesi Utara, pada 11-15 Mei 2009.

Untuk menyukseskan penyelenggaraan pertemuan internasional pertama kali yang membahas mengenai dampak perubahan iklim terhadap laut ini, yang juga menjadi poin penting dalam pelaksanaan diplomasi multilateral, maka pemerintah Indonesia melakukan sosialisasi penyelenggaraan WOC 2009 dan *draft Manado Ocean Declaration (MOD)* ke beberapa negara calon peserta dan

Organisasi Internasional. Selain itu, sosialisasi juga dilaksanakan pada sela-sela pertemuan internasional yang sedang berlangsung dan diikuti oleh Indonesia.

Sebagai hasil pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan 73 negara dan 11 organisasi internasional ini yang juga merupakan bentuk keberhasilan dari diplomasi multilateral adalah dengan disepakati dan dideklarasikannya MOD oleh negara peserta. MOD ini terdiri dari beberapa poin yaitu kesamaan pandangan mengenai pentingnya dimasukkannya aspek kelautan dalam pembahasan perubahan iklim, upaya mitigasi dan adaptasi, serta kerjasama regional dan internasional. Poin utama dalam MOD ini adalah dimasukkannya isu kelautan dan masalah pendanaan ke dalam UNFCCC, karena UNFCCC merupakan satu-satunya kerangka kerja PBB yang diakui dalam forum internasional yang membahas mengenai perubahan iklim. MOD ini juga dianggap sebagai salah satu dokumen monumental yang dapat disejajarkan dengan Protokol Montreal (1987), Deklarasi Rio de Janeiro (1992), Protokol Kyoto (1997), Deklarasi Johannesburg (2002), dan Bali Roadmap (2007).

Melalui diplomasi multilateral yang dipilih oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya dengan penyelenggaraan WOC 2009 yang menghasilkan MOD merupakan salah satu bukti keberhasilan Indonesia dalam merespon suatu isu di forum internasional. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari persiapan, penyelenggaraan, peserta yang hadir, dan juga hasil yang dicapai dalam kegiatan tersebut.

Keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan WOC 2009 dan disepakatinya MOD oleh negara-negara peserta merupakan langkah awal dari

perjuangan Indonesia dalam memperjuangkan aspek kelautan di forum internasional. Indonesia masih harus mengawal MOD selanjutnya hingga benar-benar dibahas dalam forum UNFCCC, karena bila hasil MOD ini tidak ditindaklanjuti, maka seluruh upaya Indonesia dalam menyelenggarakan WOC 2009 yang menghasilkan banyak tenaga, waktu, dan biaya ini akan menjadi mentah kembali dan sia-sia.

Keberhasilan tersebut dapat diartikan juga sebagai keberhasilan Indonesia dalam menjembatani kepentingan setiap negara tanpa mengabaikan kepentingan nasionalnya sendiri sehingga setiap pihak dapat duduk dan berdiskusi dalam perundingan tersebut. Keberhasilan ini juga menunjukkan kemampuan strategi diplomatik Indonesia yang moderat dan persuasif (*soft strategy*), dimana sebelumnya diketahui bahwa dalam setiap pembicaraan mengenai iklim global selalu diwarnai oleh klaim sepihak dan bernuansa kental sebagai ajang perebutan kepentingan.

Penyelenggaraan WOC 2009 juga telah menjadikan posisi negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam pergaulan internasional semakin diperhitungkan. Untuk Indonesia sendiri keberhasilan ini semakin menaikkan kredibilitas dan citra Indonesia dalam politik internasional, tidak hanya sebagai salah satu negara demokrasi di dunia, melainkan juga menempatkan Indonesia sebagai negara terdepan dalam isu iklim global dan memimpin negara berkembang dalam usaha polarisasi nilai tawar yang lebih baik di hadapan negara-negara maju.

Mengingat posisi Indonesia yang mulai diperhatikan dalam pergaulan internasional, terutama dalam pembahasan isu perubahan iklim, maka Indonesia harus lebih bisa menggunakan momentum tersebut untuk lebih mengarusutamakan kepentingan nasionalnya tidak selalu hanya menjadi penengah dan fasilitator kepentingan setiap negara yang ada.

Upaya pemerintah Indonesia untuk menginternasionalisasikan isu laut, terutama kaitannya dengan perubahan iklim, tidak boleh hanya berakhir dengan diselenggarakannya WOC 2009 dan disepakatinya MOD, akan tetapi perlu dilakukan pula pengkajian mengenai upaya lain yang mampu mendukung upaya pemerintah Indonesia tersebut.